

POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI KONFLIK TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Firdaus

Program Studi Ilmu Komunikasi, STISIP Mbojo Bima

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pola Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Menangani Konflik Terkait Pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima". Dengan permasalahan: 1) Bagaimanakah penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 2) Bagaimanakah penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?. Tujuan penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 2) Untuk mengetahui penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: **pertama**, berdasarkan analisis terhadap kelima indikator dari sub variabel pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik, baik melalui tatap muka; pertemuan resmi; sosialisasi; seminar atau sarasehan; melalui surat resmi hasilnya rata-rata dinilai tidak pernah dilakukan oleh pihak pemerintah. Warga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang masa bodoh dengan peristiwa yang telah merenggut korban jiwa pada Kecamatan Lambu. **Kedua**, berdasarkan analisis terhadap kelima indikator dari sub variabel pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik, baik melalui komunikasi melalui telpon; sms; rumor; gosip atau kabar burung; desas-desus, rata-rata hasilnya dinilai responden belum dilakukan. Sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memberikan kabar ataupun melakukan musyawarah bersama masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan tambang emas yang akan dilakukan.

Kata Kunci: Pola Komunikasi dan Konflik

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang lahir dalam suasana reformasi secara nyata telah membawa dampak yang lebih luas terhadap kehidupan politik lokal. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999. Jika pada masa Orde Baru, DPRD hanya sebagai "tukang stempel" dan kedudukannya di

bawah eksekutif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala Daerah, sehingga dengan berbagai pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Abdullah, 2005).

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya.

Konflik negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. Bentuk konflik negara dan masyarakat yang lazim terjadi biasanya berhubungan dengan proses pembuatan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam konteks kebijakan publik maupun pengisian jabatan publik di daerah, seperti menempatkan golongan, keluarga dan teman oleh pemegang kekuasaan eksekutif.

Tetapi tidak jarang konflik negara dan masyarakat dipicu oleh persoalan pribadi dan persaingan politik antar elit. Sehingga berakibat pada terbaikannya tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai pelayan publik.

Salah satu contoh yang merupakan konflik negara dan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bima pada tahun 2012

lalu yang dikarenakan ketidak sesuaian keinginan antara Bupati Bima selaku eksekutif dan masyarakat Bima (masyarakat Lambu).

Konflik menjadi semakin jelas ketika pemerintah daerah Kabupaten Bima Mengeluarkan surat Keputusan (SK) Bupati Bima No: 188.45/357/004/2010 tentang

eksplorasi pertambangan emas di tiga kecamatan yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara, pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24. 980 Ha.

Kebijakan izin pertambangan tersebut menimbulkan protes masyarakat Kecamatan Lambu yang secara langsung merasakan dampak dari pertambangan ini. Warga menolak keberadaan perusahaan tambang karena khawatir dengan kerusakan lingkungan di kawasan itu. Terlebih daerah itu merupakan tempat mata air yang menjadi sumber air warga. Meski berkali-kali mendapat protes warga, namun perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan tetap melanjutkan aktivitasnya.

Kehadiran kegiatan eksplorasi di Bima memang cenderung mengakibatkan reaksi dari masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang terkena langsung dampak penambangan tersebut. Masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan pertambangan yang akan mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara, tidak ada komunikasi yang baik dari pemerintah dan instansi teknis, apa kegiatan dari perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya.

Penolakan warga sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan mengantongi izin eksploitasi. Namun, yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan. Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas pertambangan, warga tidak kaget. Termasuk sebelum izin diberikan pada perusahaan

tersebut. Kenyataannya, masyarakat justru dikagetkan dengan adanya aktifitas pertambangan berupa penggalian pencarian potensi.

Konflik bisa saja dipicu oleh komunikasi yang tidak baik atau karena mis-komunikasi dan komunikasi juga bisa berfungsi untuk meredam dan menangani konflik sosial. Salah satu upaya dalam mengelola potensi konflik adalah dengan komunikasi yang intensif dari pemerintah, baik dalam tataran lokal maupun nasional, serta antar komponen masyarakat yang plural/majemuk di suatu daerah, sehingga hal-hal yang potensial memicu konflik dapat segera diidentifikasi, dilokalisir, dan diselesaikan sebelum menjadi eksplosi. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang dinilai cukup efektif, karena dengan adanya otonomi, maka daerah tentu lebih mengenal tipe masyarakat setempat, karena rentang kendali pemerintahan yang relatif lebih pendek, sehingga memudahkan menyusun kiat komunikasi yang menyejukkan untuk rakyat di daerahnya.

Salah satu pola, strategi atau teknis dalam upaya penyelesaian konflik adalah dengan cara bagaimana strategi komunikasi itu diterapkan. Strategi komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana cara mengubah opini, sikap dan perilaku terhadap berbagai komponen yang terlibat dalam konflik. Utara untuk melakukan komunikasi yang intensif dalam suasana kekeluargaan guna mencapai titik kesamaan. Strategi komunikasi adalah suatu perencanaan dan manajemen dalam upaya menyelesaikan konflik, sebab hanya dengan melakukan komunikasi yang intens antara berbagai elemen, maka seluruh elemen yang terlibat dalam konflik dapat terselesaikan dengan baik.

Apabila dikaitkan dengan ilmu komunikasi, potensi konflik terbukti dapat

dijembatani melalui komunikasi yang bersifat informative maupun persuasive, sehingga tidak berkembang menjadi eksplosi kekerasan yang merugikan rakyat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya jurus komunikasi baru diupayakan, apabila potensi konflik sudah benar-benar menjadi konflik terbuka yang menelan korban. Padahal dengan menerapkan teknik komunikasi yang tepat, potensi konflik dapat dicegah dan dilokalisir agar tidak mengalami peningkatan eskalasi, dengan memberdayakan pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat baik formal maupun non formal.

Komunikasi dalam perspektif teori konflik, memegang peranan yang sangat penting, karena kegiatan komunikasi merupakan salah satu upaya dalam mencegah, menyelesaikan, mengelola, resolusi, dan transformasi konflik. Komunikasi sebagai resolusi konflik, adalah suatu keniscayaan yang absolut, karena hanya dengan komunikasilah setiap permasalahan dan pertentangan dapat diselesaikan. Olehnya itu, diperlukan berbagai pendekatan yang benar-benar dapat diandalkan bagi upaya resolusi konflik mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mengacu pada pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik, maka penulis dalam penyelesaian studi ini mengangkat judul penelitian, yaitu: "Pola Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Menangani Konflik Terkait Pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima."

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Dan bagaimanakah penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dan Untuk mengetahui penerapan pola komunikasi formal dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bima khususnya pemerintah Kecamatan Lambu tentang pola komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan, Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis terhadap kesesuaian antara teori-teori yang diperoleh di bangku akademik dengan kenyataan dan praktek di dalam masyarakat, termasuk penerapan pola komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan, dan Diharapkan dapat pula dimanfaatkan oleh yang memerlukannya dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan informan yang lebih luas serta waktu yang relatif lama.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Deskriptif dimaksudkan di mana penulis akan menguraikan dan menggambarkan serta menganalisis tentang pola komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Rato Kecamatan

Lambu Kabupaten Bima. Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Maret 2016 sampai bulan Mei 2016 atau dilaksanakan sema tiga bulan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* (dengan memiliki kriteria inklusi) dan *key person*. *Key person* ini digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan *key person* untuk melakukan wawancara mendalam, *key person* ini adalah tokoh adat, tokoh agama. Guna memperkuat analisis data, maka dalam penelitian ini dibutuhkan pula informasi atau data yang bersumber dari beberapa *key informant* atau informan kunci yang berasal dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua Karang Taruna Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Pengertian Pola Komunikasi

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah hubungan yang berlainan (Soenarto, 2006).

Tubbs dan Moss (2001) mengatakan bahwa pola komunikasi atau hubungan itu dapat diciptakan oleh komplementaris atau simetri. Dalam hubungan komplementer, satu bentuk perilaku akan diikuti oleh lawannya. Contohnya perilaku dominan dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan. Dominasi bertemu

dengan dominasi, atau kepatuhan dengan kepatuhan (Tubbs dan Moss, 2001). Disini kita mulai melibatkan bagaimana proses interaksi menciptakan struktur system. Bagaimana orang merespon satu sama lain menentukan jenis hubungan yang mereka miliki.

Pola komunikasi adalah suatu gambara yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto, 2001). Pola Komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman, dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Dari pengertian diatas maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas, dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengaitkan dua komponen yaitu gambaran atau rencana yang menjadi langkah-langkah pada suatu aktifitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan antar organisasi ataupun juga manusia.

Pengertian Konflik

Hanson dalam(Hassan Shadily, 1993:70) mendefinisikan konflik sebagai "suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu di antara dua kesatuan

sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi."

Wexley dan Yukl (1992:51) mengemukakan, "konflik adalah suatu perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka dan mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya." Gangguan dapat meliputi usaha-usaha aktif untuk merintangi pencapaian tujuan seseorang atau penolakan secara pasif seperti : menolak untuk memberikan pengadaan bahan dan informasi yang diperlukan oleh pihak lain.

Hocker dalam Maurice Duverger (2000: 121) mengartikan konflik sebagai "suatu perasaan yang bergolak sekurang-kurangnya di antara dua kepentingan kelompok, yang merasa adanya perbedaan tujuan, pembagian sumber daya dan rintangan dari kelompok lain dalam pencapaian tujuan bersama".

Mengacu pada beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian yang disebabkan adanya perbedaan pandangan, persepsi, nilai, dan tujuan. Konflik terjadi apabila dalam kenyataan menunjukkan salah satu dari berbagai ciri sebagai berikut: *pertama*, paling tidak ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan; *kedua*, saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan, dan atau adanya suatu norma atau nilai-nilai yang saling berlawanan; *ketiga*, adanya interaksi yang ditandai dengan perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain untuk memperoleh kemenangan seperti : status, tanggungjawab, pemenuhan berbagai kebutuhan dan sebagainya;

keempat, adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan; dan *kelima*, adanya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak yang berkaitan dengan kedudukan atau kewibawaan, harga diri, prestise, dan sebagainya.

Strategi Penyelesaian Konflik

Ada tiga metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecahan masalah integratif. Dominasi atau penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) Kekerasan (*forcing*) yang bersifat penekanan otokratik. (2) Penenangan (*smoothing*), merupakan cara yang lebih diplomatis. (3) Penghindaran (*avoidance*) dimana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. (4) Aturan mayoritas (*majority rule*), mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara (*voting*) melalui prosedur yang adil. (5) Kompromi, manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak yang bertikai.

Menurut Wijono (Dean Pruitt G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2004:13), untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tujuh strategi yaitu: Menciptakan kontak dan membina hubungan, Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan, enumbuhkan kemampuan / kekuatan diri sendiri, Menentukan tujuan, Mencari beberapa alternatif, Memilih alternatif, dan Merencanakan pelaksanaan jalan keluar.

Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi ialah kerjasama/tidak kerjasama, dan tegas/tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut, maka ada 5 macam

strategi atau pendekatan penyelesaian konflik ialah: kompetisi, akomodasi, *sharing*, kolaborasi, dan penghindaran.

Pola Komunikasi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik.

Effendi (1990), mengemukakan strategi komunikasi adalah rencana meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Makna dalam strategi komunikasi adalah pemahaman dan pengetahuan yang sama sehingga dapat dikatakan komunikatif. Kegiatannya tidak hanya menyampaikan imformasi tetapi juga mengandung unsur persuasif yakni agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman dan pengaruh, sebab pada prinsinya komunikatif yang efektif adalah: bagaimana mengubah opini, bagaimana mengubah sikap, dan bagaimana mengubah perilaku.

Titik sentral setiap kegiatan komunikasi adalah imformasi yang merupakan kegiatan manusia yang setiap harinya melakukan proses komunikasi, dalam proses komunikasi keberhasilan untuk memperoleh dukungan, pengertian dan pemahaman dari khalayak tergantung dari kondisi yang ada termasuk semua unsur yang terdapat pada komunikasi.

Seitoe (Ruslan, 1997), bahwa strategi komunikasi adalah suatu kegiatan manajemen untuk melakuakan komunikasi sehingga dapat menimbulkan suatu pemahaman dalam rangka menyusun suatu rencana jangka panjang. Achmad S. Adnan Putra (Ruslan, 1997), juga mendefinisikan bahwa strategi komunikasi adalah suatu alternatif optimal yang dipilih untuk mencapai tujuan dalam rangka menyusun suatu rencana jangka panjang.

Jadi strategi komunikasi adalah rencana yang meliputi metode teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor dari proses komunikasi guna mencapai kegiatan operasionalnya demi tercapainya tujuan dan sasaran. Dari penjelasan ini jelas bahwa strategi komunikasi erat hubungannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi yang diperhitungkan sebelumnya dengan jasal yang diharapkan.

Fisher (2001), menyebutkan salah satu strategi komunikasi penting yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik adalah menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sangatlah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan komunikasi.

Implikasi tersebut, selain membantu mempermudah komunikator atau sumber komunikasi juga akan memberikan kerangka acuan perumusan isi pesan yang etis, termasuk mengenal khalayak sasaran komunikasi, bahkan dari itu akan mengurangi resiko kegagalan komunikasi. Namun sebaliknya apa bila isi pesan tidak mencerminkan aspek sosial budaya akan menuai kritik dan munculnya penolakan dari khalayak (Dilla, 2007).

Rogers dan Adhikarya (1979) menyusun strategi komunikasi dengan prinsip-prinsip antara lain: (1) Pendekatan *celling effect* dengan mengkomunikasikan pesan-pesan agar khalayak dapat mengejar ketertinggalanya. (2) Pendekatan *narrow casting* atau mengalokasikan pesan-pesan bagi khalayak. (3) Pemanfaatan saluran tradisional, dan (4) Menciptakan mekanisme keikutsertaan khalayak.

Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi

ialah kerjasama/tidak kerjasama dan tegas/tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 (lima) macam pendekatan penyelesaian konflik ialah : Kompetisi, Akomodasi, Sharing, Kolaborasi dan Penghindaran.

Pola Komunikasi Formal

Komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi / perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar dan sebagainya.

Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif, berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi.

Bila pesan mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan maka pesan itu menurut jaringan komunikasi formal. Pesan dalam jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal" (Muhammad Arni, 2005).

Menurut Effendy (2005) bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi (*organigram*).

Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando yang

dicapai oleh hirarki wewenang. Komunikasi formal dilakukan setelah akses terbuka dan untuk mempertegas suatu tujuan kegiatan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan studi banding. Komunikasi formal memiliki sifat terstruktur, terfokus, dan adanya interaksi simbol atas nama status institusi atau lembaga dari para pelaku komunikasi.

Ciri saluran komunikasi formal menurut Shibusu (Blake dan Haroldsen, 2005) yaitu: (1) saluran komunikasi berfungsi dengan standar bagi semua laporan yang datang dari berbagai sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. (2) Sumber pesan dapat dikenali dan tentunya dapat dipercaya. Sehingga dapat dijelaskan saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil, pekerjaannya, aturan, dan sanksi disusun dengan jelas, serta dapat diikuti oleh orang-orang yang berbeda. Peserta dapat dikenali dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab serta ada jalur komunikasi yang akurat.

Ada 5 (lima) tahapan atau mekanisme dalam penyelesaian konflik melalui komunikasi formal, yaitu: Tatap muka, Pertemuan resmi, Sosialisasi, Seminar atau Sarasehan, dan Melalui surat resmi.

Pola Komunikasi Informal

Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi.

“Bila karyawan berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam organisasi, maka pengarahan arus informasi bersifat pribadi. Informasi mengalir tanpa memperhatikan hubungan posisi. Jaringan komunikasi lebih dikenal dengan desas-desus (grapevine) atau kabar

angin. Informasi yang diperoleh dari desas-desus adalah yang berkenaan dengan apa yang didengar atau apa yang dikatakan orang dan bukan apa yang diumumkan oleh orang yang berkuasa” (Muhammad Arni, 2005).

Menurut Effendy (2005) bahwa sistem informal (tidak formal) adanya hubungan-hubungan sosial yang dapat memiliki kekuatan untuk menentukan wewenang yang ditransmisikan melalui sistem formal tersebut dapat diterima. Sehingga sangat penting posisi wewenang di dalam sistem formal maupun informal.

Komunikasi informal sifatnya tidak terstruktur, proses dialog lebih bebas atau tidak kaku yang bisa berlangsung lama, walaupun pembahasan bisa saja tidak fokus. Interaksi mengutamakan keakraban atau menjalin hubungan yang intens.

Komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan, misalnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya.

Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gossip, atau rumor. Tentang komunikasi informal sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan informasi yang masih belum jelas dan tidak akurat, carilah sumber informasi yang dapat dipercaya, selalu gunakan akal sehat dan bertindak berdasarkan pikiran yang positif. Informasi dalam komunikasi informal biasanya timbul melalui rantai kerumunan di mana seseorang menerima informasi dan diteruskan kepada seseorang atau lebih

dan seterusnya sehingga informasi tersebut tersebar ke berbagai kalangan.

Implikasinya adalah kebenaran informasi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur. Meski demikian komunikasi informal akan untuk memenuhi kebutuhan sosial, mempengaruhi orang lain, dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya cenderung kaku dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu.

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Kedua, jaringan komunikasi ini bias dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi.

Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi diluar dan tidak tergantung pada hierarki wewenang. Komunikasi informal ini timbul karena adanya berbagai maksud, yaitu: Pemuasan kebutuhan manusiawi, perlawanannya terhadap pengaruh yang monoton dan membosankan, keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sumber informasi hubungan pekerjaan.

Jenis lain dari komunikasi informasi adalah dasar-desus yang secara resmi tidak setuju. Desas-desus ini juga mempunyai peranan fungsional sebagai alat komunikasi tambahan bagi organisasi.

Ada 5 (lima) tahapan atau mekanisme dalam penyelesaian konflik melalui komunikasi informal, yang akan dibahas

dalam hal ini yaitu: Komunikasi melalui telpon, *Short message service (sms)*, Rumor, Gosip atau kabar burung, Desas-desus.

PEMBAHASAN

Pola Komunikasi formal Dalam Menangani Konflik Terkait Pengelolaan Tambang

Ada 5 (lima) tahapan atau mekanisme dalam penyelesaian konflik melalui komunikasi formal, yaitu: 1) tatap muka; 2) pertemuan resmi; 3) sosialisasi; 4) seminar atau sarasehan; dan 5) melalui surat resmi. Untuk mengetahui secara jelas, kelima tahapan atau mekanisme penyelesaian konflik melalui komunikasi formal, akan terlihat dengan jelas sebagaimana paparan hasil wawancara berikut.

Pola penanganan konflik melalui tatap muka, untuk mengetahui sebagaimana pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk tatap muka, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Jaenal Abidin selaku ketua LKMD Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

“Pada saat itu tidak ada usaha penyelesaian konflik secara tatap muka yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan pertambangan yang terjadi pada tahun 2011 kemarin. Saya menilai ada kesan pembiaran dari pihak pemerintah terhadap persoalan sengketa tersebut” (Hasil Wawancara, Maret 2016).

Hasil wawancara lain dilakukan pula dengan Bapak Ariyanto, S.Pd selaku ketua BPD Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

“Seharusnya pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini perlu melakukan dialog dan mufakat dengan warga secara tatap muka langsung untuk mengusahakan penyelesaian konflik yang pernah terjadi. Tapi kegiatan tatap muka semacam itu justru tidak pernah dilakukan oleh pemerintah

dengan warga kecamatan lambu. Menurut saya ini menandakan adanya sikap pemerintah yang lamban dalam menangani penyelesaian konflik" (Wawancara, Maret 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk tatap muka, hasilnya dinilai informan bahwa sejauh ini belum ada usaha penyelesaian konflik secara tatap muka yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bima sehingga dinilai ada kesan pemberian dari pihak pemerintah terhadap penyelesaian konflik persoalan sengketa tersebut.

Pola penanganan konflik melalui pertemuan formal, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk pertemuan formal, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Syafrullah selaku ketua Karang Taruna Desa Rato Kecamatan Lambu kabupaten Bima sebagai berikut :

"Belum pernah ada pertemuan resmi antara pemerintah dengan warga dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Saya sangat berharap kepada pemerintah khususnya pemerintah kabupaten bima agar segera menyelesaikan persoalan konflik yang pernah terjadi di kecamatan lambu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, yang menimbulkan korban jiwa. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini jangan hanya diam saja" (Wawancara, Maret 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk pertemuan resmi, hasilnya dinilai reponde bahwa belum pernah ada pertemuan resmi antara pemerintah dengan warga sebelum dan sesudah konflik terkait dengan

penerbitan ijin pengelolaan tambang. Sikap pemerintah sejauh ini dinilai sangat tidak efektif dalam penyelesaian konflik yang telah merenggut korban jiwa. Seharusnya pemerintah sebelum mengeluarkan ijin pengelolaan pertambangan, pemerintah harus mengadakan pertemuan resmi terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan hal tersebut.

Pola penanganan konflik melalui seminar atau sarasehan, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk seminar atau sarasehan, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi H. Abas selaku Ketua RT Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

"Jangankan mengadakan seminar kepada masyarakat..... melakukan sosialisasi saja tidak pernah dialakukan oleh pihak pemerintah. Pemerintah selalu mau menang sendiri tidak pernah mau mendengarkan apa yang kami sampaikan selaku warga. Terus terang saya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang masa bodoh dengan persoalan yang telah merenggut korban jiwa" (Wawancara, April 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk seminar resmi, hasilnya dinilai informan, bahwa pemerintah Kabupaten Bima tidak pernah melakukan seminar kepada masyarakat. Pemerintah dinilai selalu mau menang sendiri tidak pernah mau mendengarkan apa yang disampaikan warga. Sehingga warga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang masa bodoh dengan peristiwa yang telah merenggut korban jiwa di Desa Rato Kecamatan Lambu.

Pola penanganan konflik melalui surat resmi, untuk mengetahui bagaimana pola

komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk melalui surat resmi, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Lukman H. Muhammad selaku ketua RW Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

“Memang pernah ada surat resmi dari pemerintah Kabupaten Bima terkait dengan penerbitan SK penerbitan ijin pengelolaan pertambangan. Tapi surat resmi itu tidak pernah dikomunikasikan dengan masyarakat setempat. Dan saya rasa sikap pemerintah yang dinilai sepihak oleh masyarakat inilah yang memicu gejolak masyarakat kecamatan lambu. Sampai sekarang ini belum ada surat resmi untuk penyelesaian konflik setelah terjadinya konflik dari pihak pemerintah” (Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk seminar resmi, hasilnya dinilai informan, bahwa timbulnya konflik antara warga dengan pemerintah yang terjadi Desa Rato Kecamatan lambu yang menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, serta melumpuhkan aktivitas perekonomian antar daerah. Hal ini disebabkan oleh kekakuan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses mediasi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi belum begitu optimal, belum ada surat resmi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah untuk proses mediasi. Pemerintah Kabupaten Bima tidak pernah dikomunikasikan dengan masyarakat setempat terkait dengan penerbitan SK ijin pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan analisis terhadap kelima indikator dari sub variabel pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik, baik

melalui tatap muka; pertemuan resmi; sosialisasi; seminar atau sarasehan; melalui surat resmi hasilnya rata-rata dinilai tidak pernah dilakukan oleh pihak pemerintah. Warga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang masa bodoh dengan peristiwa yang telah merenggut korban jiwa Desa Rato Kecamatan Lambu. Timbulnya konflik antara warga dengan pemerintah yang terjadi Desa Rato Kecamatan lambu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, serta melumpuhkan aktivitas perekonomian antar daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya kekakuan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses mediasi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi belum begitu optimal.

Penerapan Komunikasi informal Dalam Menangani Konflik terkait Pengelolaan Tambang

Ada 5 (lima) tahapan atau mekanisme dalam penyelesaian konflik melalui komunikasi informal, yang akan dibahas dalam hal ini yaitu: 1) komunikasi melalui telpon; 2) komunikasi melalui *short message service* (sms); 3) rumor; 4) gosip atau kabar burung; dan 5) desas-desus. Untuk mengetahui secara jelas, kelima tahapan atau mekanisme penyelesaian konflik melalui komunikasi formal, akan terlihat dengan jelas sebagaimana paparan hasil wawancara berikut.

Pola penanganan konflik melalui komunikasi melalui telefon, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk komunikasi melalui telpon, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Amajid H, Zain selaku masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

"Setau saya sampai saat ini belum ada upaya proses penyelesaian konflik melalui komunikasi lewat telpon. Justru kami sangat mengharapkan adanya upaya penyelesaian dengan tidak hanya mementingkan kepentingan politik pejabat daerah sehingga kehidupan kami disini dirugikan. Dari awal kami sudah menolak dan sampai titik darah penghabisan kami juga akan menolak" (Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk komunikasi melalui telpon, hasilnya dinilai informan, bahwa belum ada informasi upaya proses penyelesaian konflik melalui komunikasi lewat telpon. Warga mengharapkan adanya upaya penyelesaian dari pemerintah daerah dengan tidak hanya mementingkan kepentingan politik pejabat daerah sehingga merugikan masyarakat Kecamatan Lambu dan segera mencabut penerbitan SK untuk ijin pengelolaan tambang pada wilayah kecamatan sape, lambu dan langgudu, karena dinilai sangat merugikan masyarakat.

Pola penanganan konflik melalui SMS (*Short Message Service*), untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk komunikasi melalui sms, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak H. Nurdin selaku masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

"Sepengetahuan saya sejauh ini memang pernah ada pesan singkat dari pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pihak kepolisian. Kalau tidak salah pesan itu berisi himbauan kepada masyarakat lambu khususnya agar tidak bersikap anarkis dan main hakim sendiri dalam menyampaikan aspirasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat kecamatan lambu untuk merundingkan dan membicarakan

hal ini secara damai tanpa merugikan pihak-pihak lain. Namun sampai detik ini belum ada sikap yang serius dari pemerintah untuk mengupayakan proses penyelesaian pasca terjadinya konflik" (Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk sms, hasilnya dinilai informan, bahwa sejauh ini belum ada informasi yang diterima oleh pihak masyarakat baik melalui sama maupun melalui telpon. Memang pernah ada pesan singkat dari pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pihak kepolisian yang isinya himbauan kepada masyarakat lambu khususnya agar tidak bersikap anarkis dan main hakim sendiri dalam menyampaikan aspirasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat kecamatan lambu untuk merundingkan dan membicarakan hal ini secara damai tanpa merugikan pihak-pihak lain. Namun sampai detik ini belum ada sikap yang serius dari pemerintah untuk mengupayakan proses penyelesaian pasca terjadinya konflik.

Pola penanganan konflik melalui rumor, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk rumor, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

"Kami belum pernah mendengar kabarnya akan adanya niatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ijin pertambangan ini, sampai-sampai menelan korban jiwa demi mendapatkan keadilan selaku warga negara" (Wawancara, April 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola

komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk rumor, hasilnya dinilai informan, bahwa belum pernah mendengar adanya kabar atau rumor yang beredar akan penyelesaian kasus tuntutan penolakan masyarakat terhadap ijin pengelolaan pertambangan diwilayah kecamatan lambu, yang sudah menelan korban jiwa.

Pola penanganan konflik melalui gosip atau kabar burung, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk gosip atau kabar burung, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

“Terus terang saja saya pribadi tidak pernah mendengar gosip atau kabar usaha pemerintah untuk penyelesaian konflik yang terjadi, sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar kabar tersebut” (Wawancara, April 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk gosip atau kabar burung, hasilnya dinilai informan, bahwa masyarakat tidak pernah mendengar gosip atau kabar, upaya pemerintah untuk penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

Pola penanganan konflik melalui desas-desus, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk desas-desus, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahim, selaku masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memberikan kabar ataupun melakukan musyawarah bersama kami terhadap kebijakan pengelolaan tambang emas yang akan dilakukan. Terus terang saja kami sangat kecewa

dengan sikap pemerintah Kabupaten Bima yang hanya bersikap diam atas konflik sengketa lahan yang menimbulkan hilangnya nyawa dari saudara kami. Dari awal kami sudah menolak dengan adanya rencana keberadaan tambang di daerah kami karena hal itu justru akan merusak lingkungan dari sektor pertanian kami” (Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik dalam bentuk desas-desus, hasilnya dinilai informan, bahwa sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memberikan kabar ataupun melakukan musyawarah bersama masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan tambang emas yang akan dilakukan. Pemerintah tidak pernah menyampaikan keputusan terhadap tuntutan yang di ajukan masyarakat, masyarakat menilai jangankan langkah nyata penyelesaian persoalan yang diterima langsung dari pemerintah, gosip maupun desas-desus belum ada.

Berdasarkan analisis terhadap kelima indikator dari sub variabel pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik, baik melalui komunikasi melalui telpon; sms; rumor; gosip atau kabar burung; desas-desus, rata-rata hasilnya dinilai informan belum dilakukan. Sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memberikan kabar ataupun melakukan musyawarah bersama masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan tambang emas yang akan dilakukan. Pemerintah tidak pernah menyampaikan keputusan terhadap tuntutan yang di ajukan masyarakat, masyarakat menilai belum ada langkah nyata penyelesaian persoalan yang diterima langsung dari pemerintah

KESIMPULAN

Dari rangkaian pembahasan, terutama mengacu pada bab pembahasan hasil

penelitian (Bab IV), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pola komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menangani konflik terkait pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut: 1) Berdasarkan analisis terhadap kelima indikator dari sub variabel pola komunikasi formal dalam penyelesaian konflik, baik melalui tatap muka; pertemuan resmi; sosialisasi; seminar atau sarasehan; melalui surat resmi hasilnya rata-rata dinilai tidak pernah dilakukan oleh pihak pemerintah. Warga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang masa bodoh dengan peristiwa yang telah merenggut korban jiwa Desa Rato Kecamatan Lambu. Timbulnya konflik antara warga dengan pemerintah yang terjadi Desa Rato Kecamatan lambu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, serta melumpuhkan aktivitas perekonomian antar daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya kekakuan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses mediasi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi belum begitu optimal, dan 2) Berdasarkan analisis terhadap kelima indikator dari sub variabel pola komunikasi informal dalam penyelesaian konflik, baik melalui komunikasi melalui telpon; sms; rumor; gosip atau kabar burung; desas-desus, rata-rata hasilnya dinilai informan belum dilakukan. Sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memberikan kabar ataupun melakukan musyawarah bersama masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan tambang emas yang akan dilakukan. Pemerintah tidak pernah menyampaikan keputusan terhadap tuntutan yang diajukan masyarakat, masyarakat menilai belum ada langkah nyata penyelesaian persoalan yang diterima langsung dari pemerintah.

KEPUSTAKAAN

- Arni, Muhammad, 2005. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hafied Cangara. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Dahrendorf, Ralf, 1986, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa-Kritik*, Rajawali, Jakarta.
- DeVito, JA., 2011. *Komunikasi Antarmanusia*. Maulana A, penerjemah. Wahyu YI, Prihantini Y, Editor. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.
- Effendy, Onong Uchjana, 2004. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Francis, Diana. 2002. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills
- Fisher, Simon. 2001, *Mengelola Konflik Keterampilan Untuk Strategi Bertindak*. SMK Grafika Desa Putra: Jakarta.
- Hendricks, William**, 2000, *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif)*, Bumi Aksara: Jakarta
- Liliweri, Alo. 1991. *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miall, Hugh, dkk., 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kelimabelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Deddy 2005, *Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., 2008. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Susan, Novri, 2009, *Pengantar Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta.